



RENCANA KERJA 2025

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO



(0271) 593037

dishub@sukoharjokab.go.id

<https://dishub.sukoharjokab.go.id>



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segenap ilmu dan karunia-Nya, akhirnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini disusun sebagai tindak lanjut atas amanat perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dengan harapan dapat menjadi pedoman kerja dalam meningkatkan kinerja sarana transportasi, meningkatkan kinerja prasarana transportasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik, sehingga dapat mewujudkan pelayanan transportasi daerah yang baik dalam kurun waktu satu tahun anggaran di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Seiring dengan perkembangan jaman, sarana dan prasarana perhubungan sudah menjadi kebutuhan pokok guna menggerakkan produktifitas dan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sehingga target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 dapat tercapai dengan baik.

Selanjutnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari kata sempurna mengingat masih banyak kendala dan

keterbatasan dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, atas semua kekurangan dalam penyusunan naskah ini diharapkan adanya tanggapan, saran dan umpan balik yang membangun sehingga segala kekurangan dalam penyusunan naskah rencana kerja pada tahun berikutnya dapat lebih baik dan terarah.

Sebagai kata akhir, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada segenap jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan semua pihak terkait yang telah membantu sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah , anugerah dan hidayah-Nya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Sukoharjo, Juli 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Drs. FX. TONI SRI BUNTORO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19661110 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026	6
2.1.1. <i>Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023</i>	6
2.1.2. <i>Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026</i>	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	16
2.2.1. <i>Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)</i>	16
2.2.2. <i>Data Pokok</i>	17
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	24
2.3.1. <i>Kedudukan dan fungsi</i>	24
2.3.2. <i>Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural</i>	25
2.3.3. <i>Tantangan Dan Hambatan Dalam Peningkatan Kinerja</i>	32
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat	36
2.6. Inovasi Perangkat Daerah	38
2.7. Penghargaan	38
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	39
3.1.1. <i>Arah Kebijakan dan Strategi Transportasi Nasional</i>	39
3.1.2. <i>Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Perhubungan</i>	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	42

3.2.1. <i>Visi dan Misi</i>	42
3.2.2. <i>Tujuan Perangkat Daerah</i>	45
3.2.3. <i>Sasaran Perangkat Daerah</i>	46
3.2.4. <i>Arah Kebijakan</i>	47
3.2.5. <i>Strategi</i>	48
3.3. Cascading Perencanaan Perangkat Daerah	50
3.4. Formulasi (metadata) Indikator Kinerja yang ada (Indikator Tujuan/Sasaran/Program)	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
4.1. Program dan Kegiatan	65
4.2. Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana	71
4.3. Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan	71
BAB V PENUTUP	73
LAMPIRAN	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021-2026 Kabupaten Sukoharjo merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025. Sesuai dengan Visi Kabupaten Sukoharjo, sektor transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan keamanan yang mutlak perlu dikembangkan untuk melancarkan pergerakan manusia, barang, jasa dan informasi, sehingga akan memperlancar kegiatan perekonomian dan pengembangan sumber daya alam yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan sektor transportasi harus berlandaskan pada pemanfaatan potensi secara optimal, agar tercapai efektifitas dan efisiensi pelayanan.

Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Sukoharjo merupakan solusi dalam mengantisipasi permasalahan transportasi yang muncul disebabkan adanya ketidakseimbangan antara peningkatan kendaraan dan penyebaran jumlah penduduk pada wilayah perkotaan serta dapat menurunkan indeks fatalitas setiap tahun yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026.

Kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang digunakan dalam rangka meningkatkan tata kelola transportasi masih belum dapat dikategorikan ideal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kondisi yang ada antara lain :

- a. Kurang tercukupinya fasilitas perlengkapan keselamatan jalan seperti APJ, rambu-rambu, marka, dan guardril pada ruas jalan khususnya di daerah rawan kecelakaan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan.
- b. Kondisi fasilitas terminal, halte sebagai tempat pemberhentian dan pemberangkatan angkutan masih belum sesuai dengan

standar minimal yang ditetapkan serta belum memenuhi target ketersediaan terminal yang telah ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo;

- c. Kepatuhan masyarakat (awak angkutan, penumpang dan pengguna jalan) terhadap rambu-rambu lalu lintas yang belum membudaya;
- d. Sistem tata kelola traffic light yang perlu diintegrasikan lebih baik;
- e. Tata kelola pelayanan trayek angkutan umum yang perlu ditingkatkan dan diratakan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah; dan
- f. Kelaikan kendaraan angkutan yang perlu ditingkatkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan
- m. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026;
- n. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan kinerja dan menjadi pedoman dalam merencanakan anggaran dan merupakan suatu alat untuk mengukur kinerja instansi yang efektif, berkelanjutan. Maksud dari Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah untuk memberikan

pedoman kerja tahun 2025 bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dan instansi terkait, sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 adalah :

- a. Terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;
- b. Terwujudnya Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam rangka mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- d. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana yang lengkap dan inovatif;
- f. Terwujudnya kondisi kelalulintasan yang aman dan kondusif;
- g. Terwujudnya standar minimal pelayanan masyarakat yang baik di bidang perhubungan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 yang mengimplementasikan perencanaan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

- 2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023
- 2.1.2. Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
 - 2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)
 - 2.2.2. Data Pokok
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
 - 2.3.1. Kedudukan dan fungsi
 - 2.3.2. Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural
 - 2.3.3. Tantangan Dan Hambatan Dalam Peningkatan Kinerja
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat
- 2.6. Inovasi Perangkat Daerah
- 2.7. Penghargaan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Transportasi Nasional
 - 3.1.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Perhubungan
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo
 - 3.2.1. Visi dan Misi
 - 3.2.2. Tujuan Perangkat Daerah
 - 3.2.3. Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.2.4. Arah Kebijakan
 - 3.2.5. Strategi
- 3.3. Cascading Perencanaan Perangkat Daerah
- 3.4. Formulasi (metadata) Indikator Kinerja yang ada (Indikator Tujuan/Sasaran/Program)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan
- 4.2. Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana
- 4.3. Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana satu urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu urusan perhubungan pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 3 program, 19 kegiatan dan 47 sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja keuangan yang terdiri dari 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, capaian sebesar 90.42% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, capaian 84.70%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, capaian 98.37%.
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, capaian sebesar 84.42% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, capaian 83.58%.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, capaian 99.26%.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, capaian 90.22%.

- 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, capain sebesar 59.95% dengan rincian :
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, capaian 57.79%.
 - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi capaian sebesar 99.40%
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah capain sebesar 92.01% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, capaian 99.82%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 99.31%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, capaian 85.43%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, capaian 88.05%.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, capaian 75.50%.
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, capaian 90.40%
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, capaian 99.12%.
- 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capain sebesar 99.45% dengan rincian capaian Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, capaian 99.45%.
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah capain sebesar 92.21% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, capaian 98.61%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, capaian 79.20%.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, capaian 97.82%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 96.58%.
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah capaian sebesar 97.71% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, capaian 97.52%.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, capaian sebesar 99.01%.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, capaian 84.03%.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri dari 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan, dengan rincian capaian kinerja keuangan sebagai berikut:
- 2.1 Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota capaian sebesar 94.40% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, capaian 92.53%.
 - b. Sub Kegiatan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, capaian sebesar 92.70%.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, capaian sebesar 81.55%.
- 2.2 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 97.33% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 96.96%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, capaian 98.83%.
 - c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, capaian 95.68%.
 - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, capaian 97.86%.
- 2.3 Kegiatan Pengelolaan Terminal, capain sebesar 92.51% dengan capaian Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), capaian sebesar 92.51%.
- 2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, capain sebesar 95.81% dengan capaian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 95.81%.
- 2.5 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capain sebesar 92.99% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian sebesar 87.77%.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 98.26%.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 97.20%.
 - d. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 88.75%.
- 2.6 Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, capain sebesar 96.69% dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, capaian sebesar 96.32%.
 - b. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, capaian 72.07%.
- 2.7 Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, capain sebesar 70.50% dengan capaian Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin capaian sebesar 70.50%.
- 2.8 Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, capaian sebesar 88.73%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, capaian 97.13%.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, capaian 86.90%.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, capaian 94.07%.
- 2.9 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 92.93%, dengan rincian capaian sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atai Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian 98.31%.

- b. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, capaian 87.56%.
- 2.10 Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota capain sebesar 83.01% dengan capaian Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian sebesar 83.01%
- 2.11 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, capaian sebesar 94.58%, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, capaian 96.13%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota, capaian 93.04%.
3. Program Pengelolaan Perkretaapian, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, dengan rincian capaian Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar 94.73% serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota capaian sebesar 94.73%.

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja sub kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa 47 sub kegiatan Dinas Perhubungan

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 rata-rata capaian kinerja output sub kegiatan sebesar 102.59 %. Disisi lain, secara umum pelaksanaan sub kegiatan yang menjadi penunjang utama pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2016-2021 telah dapat direalisasikan dengan baik dengan pencapaian rata-rata kinerja output sub kegiatan mencapai prosentase 102.59 %. Hasil pengukuran Kinerja Keuangan, capaian program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dapat tercapai 96.27 %. Bila dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, maka capaian indikator kinerja keuangan tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 97.85 % menjadi 96.27 %.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pencapaian kinerja keuangan sebesar 96.27 % guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang berpedoman pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo periode 2016-2021. Dalam hal pencapaian target kinerja sub kegiatan atau output sub kegiatan dapat terealisasi secara maksimal dengan presentase 102.59 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang baik dimana realisasi kinerja lebih baik dari pada realisasi keuangan.

2.1.2. Capaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Pada Tahun 2023 Realisasi Kinerja Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo “Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah Yang Baik” mencapai target 188,72%. Realisasi Kinerja Sasaran “Meningkatnya kinerja sarana transportasi” 200%, Sasaran “Meningkatnya kinerja prasarana transportasi 136,96%, sedangkan sasaran “Meningkatnya

kualitas aparatur dan pelayanan *public*” hanya mencapai 93,48%.
Capaian tersebut dapat tergambar pada Tabel di bawah ini :

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2023

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2022	2023		Persentase Capaian s/d Triwulan IV	Status Capaian RPJMD	PD Penanggung Jawab	Pendukung	Penghambat
						Target	Realisasi s/d Triwulan IV					
1	Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah Yang Baik	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Rasio	0,290	0,05	0,195	0,022	188,72%	Telah Tercapai	OPSDAL	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan, Sudah tersedianya Sarana dan Prasarana Kelengkapan Jalan, Tersedia anggaran untuk memenuhi kelengkapan jalan, Sinergitas antar Instansi vertikal, Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin	Bertambahnya mobilitas masyarakat
1.1	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Percent	0,5	0,33	0,90	0	200,00%	Telah Tercapai	OPSDAL	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan, Sudah tersedianya Sarana dan Prasarana Kelengkapan Jalan, Tersedia anggaran untuk memenuhi kelengkapan jalan, Sinergitas antar Instansi vertikal, Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin	
1.1.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	Percent	71,8	74,08	70,90	74,04	104,43%	Telah Tercapai	ANGKUTAN DAN PKB	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan target, Tersedianya anggaran untuk mencapai target, Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin, Tingginya kesadaran masyarakat untuk uji kendaraan, Adanya kegiatan perawatan peralatan pengujian kendaraan bermotor dan SIM PKB Serta adanya Tersedia anggaran sosialisasi untuk kegiatan PKB	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengujian kendaraan bermotor
		Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	Percent	11,98	10,75	10,27	10,76	104,77%	Telah Tercapai	ANGKUTAN DAN PKB	Komitmen perangkat daerah mencapai target, Sinergitas antar instansi vertikal, Tersedianya layanan Buy The Servis Batik Solo Trans dan Trans jateng yang melintas di kab. Sukoharjo	Minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum masih sangat rendah, Usia kendaraan angkutan umum pedesaan sudah melebihi ketentuan, Banyak angkutan umum yang sudah tidak berjalan sesuai trayek
1.1.2	Program Pengelolaan Pelayanan	Prosentase kinerja layanan penyeberangan sungai	Percent	100	91,67	0	0	0,00%	Telah Tercapai	ANGKUTAN DAN PKB		Dicabutnya izin operasional penyeberangan sehingga kegiatan tidak dilaksanakan

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD 2026	Realisasi 2022	2023		Persentase Capaian s/d Triwulan IV	Status Capaian RPJMD	PD Penanggung Jawab	Pendukung	Penghambat
						Target	Realisasi s/d Triwulan IV					
1.2	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Percent	24	15,39	19	11,98	136,95%	Telah Tercapai	OPSDAL		Bertambahnya mobilitas masyarakat
1.2.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Liaj)	Prosentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	Percent	86	82,2	83	83,00	100,00%	Telah Tercapai	LALULINTAS	Komitmen Perangkat Daerah dalam mewujudkan tujuan, Sudah tersedianya Sarana dan Prasarana Kelengkapan Jalan, Tersedia anggaran untuk memenuhi kelengkapan jalan, Sinergitas antar Instansi vertikal, Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin	
1.2.2	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Prosentase kinerja layanan perkeretaapian	Percent	100	100	100	100	100,00%	Telah Tercapai	OPSDAL	komitmen perangkat daerah dalam mencapai target, Sinergitas internal Dinas Perhubungan, instansi pemda kabupaten dan antar instansi vertikal, monitoring anggaran secara rutin dan berkala	Minimnya SDM yang belum memadai dalam bidangnya
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntable Dan Pelayanan Publik Yang Reponsif	Predikat SAKIP	Predikat	A	BB	B	B	B	Telah Tercapai	SEKRETARIAT	Komitmen Perangkat Daerah dalam meningkatkan nilai SAKIP, Sudah tersedianya dokumen kelengkapan perangkat daerah, Sudah terpublikasinya dokumen perangkat daerah di web Dinas Perhubungan, Sinergitas antar Perangkat Daerah, Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin	aplikasi SISAKIP yang belum mendukung untuk pengukuran kinerja Dinas Perhubungan
2.1	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan public	Nilai SAKIP	Percent	79	72,96	70	65,44	93,49%	Tidak tercapai	SEKRETARIAT	Komitmen Perangkat Daerah dalam meningkatkan nilai SAKIP, Sudah tersedianya dokumen kelengkapan perangkat daerah, Sudah terpublikasinya dokumen perangkat daerah di web Dinas Perhubungan, Sinergitas antar Perangkat Daerah, Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin	aplikasi SISAKIP yang belum mendukung untuk pengukuran kinerja Dinas Perhubungan
2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	Prosentase	100	100	100	100	100,00%	Telah Tercapai	SEKRETARIAT	Komitmen Perangkat Daerah dalam mencapai target, Tersedianya anggaran, Terlaksananya monitoring anggaran secara rutin	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Indikator Tujuan Dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI 2022	TARGET KINERJA					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya pelayanan transportasi daerah yang baik		Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Angka	0,270	0,310	0,31	0.195	0.190	0.185	0.180
	Meningkatnya kinerja sarana transportasi	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Persen	0,33	2,00	1,5	0,9	0,85	0,75	0,5
	Meningkatnya kinerja prasarana transportasi	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Persen	15,39	26,5	26	19	18,5	18	17,5
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Angka	61	63	66	70	75	77	79

2.2.2. Data Pokok

A. Kondisi Aparatur

Jumlah aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo per 30 Juni 2024 sejumlah 151 orang, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 38 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 42 orang, Pegawai PPPK sebanyak 3 orang, Pegawai Honorer sebanyak 11 orang, dan Pegawai Jasa Tenaga Harian Lepas sebanyak 95 orang. Berdasarkan Eselon terdiri dari Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, dan Eselon IV sebanyak 7 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, Aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dapat dikategorikan Strata 2 (S 2) sebanyak 6 orang, Strata 1 (S 1) sebanyak 10 orang, Diploma III (D 3) sebanyak 13 orang, SMA sebanyak 10 orang, SMP sebanyak 2 orang, dan SD sebanyak 1 orang.

Hal tersebut dapat diketahui dari tabel sebagai berikut:

JUMLAH PEGAWAI DISHUB 2024

No	PNS	CPNS	PPPK	THL	HONORER	JUMLAH
1	38	4	3	95	11	151

Data Kepegawaian Per 30 Juni 2024

ASN DISHUB MENURUT GOLONGAN

No	Gol. A	Gol. B	Gol. C	Gol. D	Ket/ Gol	JUMLAH
1	5	1	1		IV	7
2	14	5	3	2	III	24
3	2	1	6	2	II	11
	21	7	10	4		42

Data Kepegawaian Per 30 Juni 2024

ASN MENURUT ESELON

No	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Keterangan
1	1			Kepala Dinas (II A)
2		1		Sekretaris (III A)
3		3		Kabid (III B)
4			2	Kasubbag dan Kasi
5			5	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	1	4	7	12

Data Kepegawaian Per 30 Juni 2024

ASN DISHUB TINGKAT PENDIDIKAN

No	SD	SLTP/ SMP	SLTA/ SMA	D3/D4 SARJANA MUDA	SARJANA (S1)	PASCA SARJANA (S2)	JUMLAH
1	1	2	10	13	10	6	42

Data Kepegawaian Per 30 Juni 2024

B. Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo terletak di Jl. Rajawali Nomor 7 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo, bangunan terdiri dari 2 (dua) gedung utama yaitu 1 (satu) gedung induk administrasi perkantoran dan 1 (satu) gedung induk pelayanan pengujian kendaraan bermotor serta 2 (dua) gedung pendukung kegiatan operasional yaitu 1 (satu) gedung pertemuan yang tergabung dengan ruang CCTV/ ATCS (Automatic Traffic Control System) dan 1 (satu) gedung bengkel perbaikan rambu lalu lintas.

Sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu kendaraan bermotor, gedung dan bangunan serta alat pengujian kendaraan bermotor. Kendaraan operasional terdiri dari 7 (tujuh) kendaraan roda empat yang digunakan untuk operasional patroli/ pengawalan, operasional sosialisasi keselamatan dan operasional pemeliharaan dan perbaikan traffic light/ penerangan jalan umum dan 2 (dua) kendaraan roda dua untuk operasional pengawalan dan pengamanan lalu lintas sedangkan

kendaraan dinas jabatan terdiri dari 5 (lima) kendaraan roda empat dan 19 (sembilan belas) kendaraan roda dua sehingga secara total terdapat 33 (tiga puluh tiga) kendaraan dinas. Hal tersebut dapat diketahui dari tabel berikut :

a. Kendaraan bermotor, terdiri dari :

Gambar 3.

NO	JENIS	MERK	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Mobil	Toyota Kijang Inova	1	Dinas Jabatan
2	Mobil	Toyota Rush	1	Dinas Jabatan
3	Mobil	Toyota Avanza	3	Dinas Jabatan
4	Mobil	Toyota Rush	2	Patroli
5	Mobil	Toyota Kijang Super	1	Operasional
6	Mobil	Isuzu Panther PU	1	Operasional
7	Mobil	Hino 300 Ps (Mobil Tangga)	2	Operasional
8	Mobil	Isuzu PS (Mobil Tangga)	1	Operasional
9	Sepeda Motor	Yamaha Scorpio	2	Patroli
10	Sepeda Motor	Honda Supra X	7	Dinas Jabatan
11	Sepeda Motor	Suzuki Thender	4	Dinas Jabatan
12	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	6	Dinas Jabatan
13	Sepeda Motor	Yamaha Lexi S	2	Dinas Jabatan

b. Gedung dan Bangunan, terdiri dari :

Gambar 4.

Nomor	Keterangan	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Harga (ribuan Rp)
1	2	3	4	5
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	536.37	Jl. Rajawali Nomor 7 Sukoharjo	462.450,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	277.59	Jl. Rajawali Nomor 7 Sukoharjo	775.868,75
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	80.5	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali Nomor 7 Sukoharjo	190.403,50
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	24.5	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali Nomor 7 Sukoharjo	85.915,50
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	28	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali Nomor 7 Sukoharjo	73.499,00
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	37.5	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali Nomor 7 Sukoharjo	187.805,00
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	55	Jl. Rajawali Nomor 7 Sukoharjo	94.215,00
8	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	24	Jl. Rajawali Nomor 7 Sukoharjo	23.600,00
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	91.85	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali Nomor 7 Sukoharjo	104.734,50
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	320.87	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali	203.319,65

			No 7 Sukoharjo	
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	400.77	Terminal Watukelir Kabupaten Sukoharjo	158.814,00
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	64	Jl. Rajawali Nomor 7 Joho Sukoharjo	85.658,75
13	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	7	Desa Kadilangu, Kecamatan Baki	26.257,00
14	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	1082.22	Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	3.297.105,00
15	Bangunan Halte/Shelter		Jl. Slamet Riyadi	29.458,00
16	Bangunan Halte/Shelter		Jl. Slamet Riyadi	29.458,00
17	Bangunan Halte/Shelter		Jl. Jendral Sudirman (1)	29.459,60
18	Bangunan Halte/Shelter		Jl. Slamet Riyadi	21.292,00
19	Bangunan Halte/Shelter		Jl. Slamet Riyadi	21.292,00
20	Bangunan Halte/Shelter		Jl. Jendral Sudirman	21.292,00
21	Bangunan Halte/Shelter		Jl. Jendral Sudirman (1)	21.296,40
22	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	735.07	Jl. Jend, Sudirman Sukoharjo	90.135,00
23	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	3.237,10
24	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	3.237,10
25	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	3.237,10
26	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	3.237,10
27	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	3.237,10
28	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	3.237,10
29	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	3.237,10
30	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	3.237,10
31	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	31.96	Dishubinfokom Sukoharjo	52.000,00
32	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	50.45	Jl. Rajawali No 7 Sukoharjo	113.214,50
33	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	9	Pasar Ir Soekarno Kabupaten Sukoharjo	42.868,00
34	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	17.6	Kantor Dinas Perhubungan Jl. Rajawali No 7 Sukoharjo	60.500,00
35	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30.443,33
36	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30.443,33
37	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30.443,33
38	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30.443,33
39	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30.443,33
40	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	6.45	Jl Mojo-Sidan	30.443,35
41	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1903.74	Jl. Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura	15.566.096,74
42	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno (5.232,56

43	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	5.232,56
44	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	5.232,56
45	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	5.232,56
46	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	5.232,56
47	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	5.232,56
48	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	5.232,56
49	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	5.232,56
50	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	5.232,56
51	Bangunan Stasiun Bus Lain-lain (dst)		Jl. Ir Soekarno	5.232,56
52	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	31.5	Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten SUkoharjo Jl. Rajawali Nomor 7 Joho Sukoharjo	77.060,25
53	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya		Underpass Jl Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura	485.664,89
54	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya		Undepass Jl. Slamet Riyadi, Makamhaji, Kartasura	10.000,00
JUMLAH				22.701.615,40

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2023)

c. Peralatan dan Mesin

NAMA BARANG		JUMLAH	NILAI (Rp.)
Dinas Perhubungan		3.458	27.363.286.704,00
ALAT BESAR		9	817.696.000,00
-	alat besar darat lainnya lainnya (dst)	1	752.496.000,00
-	Pompa Air	8	65.200.000,00
KOMPUTER		143	1.161.915.245,00
-	Komputer Jaringan lainnya	1	20.000.000,00
-	P.C Unit	29	305.558.225,00
-	Lap Top	31	365.499.400,00
-	Note Book	1	4.620.000,00
-	Tablet PC	3	20.950.000,00
-	Personal Komputer lainnya	4	121.648.000,00
-	Card Reader (Peralatan Mini Komputer)	2	8.061.120,00
-	Speaker Komputer	1	980.000,00
-	Monitor	5	10.135.000,00
-	Printer (Peralatan Personal Komputer)	47	212.506.500,00
-	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	5.950.000,00
-	External/ Portable Hardisk	4	3.850.000,00
-	Peralatan Personal Komputer lainnya	8	70.222.000,00
-	Router	1	850.000,00
-	Modem	3	1.650.000,00
-	Peralatan Komputer lainnya	2	9.435.000,00
ALAT KESELAMATAN KERJA		3	74.000.000,00

-	Genset	1	60.000.000,00
-	Air Conditioning (AC)	2	14.000.000,00
	RAMBU – RAMBU	2.730	18.088.460.944,00
-	Traffic Light	355	5.892.043.275,00
-	rambu bersuar lainnya (dst)	73	2.331.218.246,00
-	Rambu Jalan	899	1.084.313.683,00
-	Rambu Papan Tambahan	64	303.494.717,00
-	Rambu Cermin	25	124.598.000,00
-	Rambu-rambu Larangan	5	6.457.200,00
-	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	170	288.015.700,00
-	Guardrail	43	331.680.000,00
-	rambu tidak bersuar lainnya (dst)	692	3.399.044.041,00
-	Rambu-rambu Lalin Darat lainnya	404	4.327.596.082,00
	ALAT ANGKUTAN	37	3.388.889.750,00
-	Station Wagon	8	1.485.340.250,00
-	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	1	24.500.000,00
-	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	119.600.000,00
-	Truck + Attachment	1	384.057.500,00
-	Sepeda Motor	21	372.760.000,00
-	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (dst)	2	9.840.000,00
-	kendaraan bermotor khusus lainnya (dst)	1	987.792.000,00
-	Gerobak Tarik	2	5.000.000,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	14	2.042.070.000,00
-	perkakas bengkel khusus lainnya (dst)	2	59.390.000,00
-	perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	1	500.000.000,00
-	alat ukur universal lainnya (dst)	5	271.030.000,00
-	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2	33.000.000,00
-	alat timbangan/biara lainnya (dst)	1	99.000.000,00
-	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1	177.650.000,00
-	Brake Tester	1	898.000.000,00
-	alat ukur lainnya lainnya (dst)	1	4.000.000,00
	ALAT PERTANIAN	5	6.044.000,00
-	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	5	6.044.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	426	1.069.235.715,00
-	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	3	2.830.000,00
-	Mesin Ketik Listrik	1	2.330.000,00
-	Lemari Besi/Metal	3	13.980.000,00
-	Lemari Kayu	13	31.701.375,00
-	Rak Besi	4	63.712.000,00
-	Filing Cabinet Besi	24	63.565.340,00
-	Brandkas	1	16.500.000,00
-	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	4.110.000,00
-	Rotary Filling	1	29.800.000,00

-	Lemari Kaca	1	3.400.000,00
-	CCTV - Camera Control Television System	10	68.725.000,00
-	Mesin Absensi	1	6.000.000,00
-	Alat Kantor Lainnya	11	49.400.000,00
-	Meja Kerja Besi/Metal	1	17.000.000,00
-	Meja Kerja Kayu	102	88.249.500,00
-	Kursi Besi/Metal	4	8.400.000,00
-	Sice	2	1.296.000,00
-	Bangku Panjang Besi/Metal	2	4.500.000,00
-	Meja Rapat	10	13.900.000,00
-	Meja Resepsionis	1	2.450.000,00
-	Meja Panjang	5	4.700.000,00
-	Kursi Rapat	4	3.900.000,00
-	Kursi Tamu	2	4.275.000,00
-	Kursi Putar	38	35.020.000,00
-	Kursi Biasa	4	8.000.000,00
-	Bangku Tunggu	2	4.500.000,00
-	Meubeleur lainnya	8	4.500.000,00
-	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.500.000,00
-	Mesin Pemotong Rumput	3	8.250.000,00
-	Lemari Es	1	2.430.000,00
-	A.C. Window	3	23.700.000,00
-	A.C. Split	18	101.285.000,00
-	Kipas Angin	3	5.400.000,00
-	Exhaust Fan	2	4.000.000,00
-	Kompas Gas (Alat Dapur)	1	1.300.000,00
-	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	500.000,00
-	Kitchen Set	1	11.000.000,00
-	Tabung Gas	1	630.000,00
-	Televisi	9	47.449.000,00
-	Amplifier	1	550.000,00
-	Sound System	2	29.175.000,00
-	Wireless	1	9.930.000,00
-	Megaphone	3	1.650.000,00
-	Microphone	1	4.500.000,00
-	Mic Conference	1	1.100.000,00
-	Unit Power Supply	13	12.215.000,00
-	Camera Video	3	33.400.000,00
-	Camera film	1	2.250.000,00
-	Tangga Aluminium	1	1.350.000,00
-	Dispenser	6	16.325.000,00
-	Handy Cam	1	9.800.000,00
-	Alat Rumah Tangga Lainnya	58	88.307.500,00
-	Alat Pemadam/Portable	2	2.000.000,00
-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	9.000.000,00
-	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon II	1	5.500.000,00
-	Meja Tamu Biasa	2	11.050.000,00
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	5.550.000,00
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	5.420.000,00
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	4.820.000,00
-	Kursi Kerja Pegawai Non	6	4.080.000,00

Struktural			
-	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	2	23.362.500,00
-	Buffet Kayu	1	13.712.500,00
-	Buffet Kaca	1	2.550.000,00
-	Lemari Arsip Pejabat lainnya	4	6.450.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		76	210.454.050,00
-	Audio Mixing Portable	2	8.925.000,00
-	Microphone/Wireless MIC	4	11.025.000,00
-	Camera Electronic	1	9.750.000,00
-	Video Caption Adder	1	2.000.000,00
-	Layar Film/Projector	1	7.700.000,00
-	LCD Monitor	1	1.417.500,00
-	Camera Conference	1	18.500.000,00
-	Kamera Udara	1	23.250.000,00
-	Telephone Mobile	2	6.000.000,00
-	Handy Talky (HT)	57	107.346.000,00
-	Facsimile	1	2.000.000,00
-	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	1.200.000,00
-	Finger Printer Time and Attendance Acces Control System	1	4.592.000,00
-	alat komunikasi khusus lainnya (dst)	1	1.748.550,00
-	alat komunikasi lainnya lainnya (dst)	1	5.000.000,00
ALAT LABORATORIUM		14	502.846.000,00
-	Head Light Tester	1	350.750.000,00
-	Diesel Smoke Tester	1	131.200.000,00
-	Portable Router	6	16.996.000,00
-	Papan Panel	6	3.900.000,00
ALAT PERSENJATAAN		1	1.675.000,00
-	Layar Proyektor	1	1.675.000,00
		3.458	27.363.286.704,00

(Sumber : Simda BMD Per 31 Desember Tahun 2023)

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

2.3.1. Kedudukan dan fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74

Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
2. Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
 - e. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.2. Struktur, Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural

Dalam pelaksanaannya Kepala Dinas dibantu oleh struktur di bawahnya sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana,

- program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Perhubungan;
- 2) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - 3) pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - 4) pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - 5) pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 6) penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 8) pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - 9) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas 2 sub bagian, yaitu Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

b. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan, penyediaan perlengkapan jalan di jalan, penerbitan izin penyelenggaraan, dan pembangunan fasilitas parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan. Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- 1) perumusan program kegiatan di bidang lalu lintas;
- 2) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang lalu lintas;
- 3) penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLI),
- 4) pengelolaan prasarana lalu lintas, pengelolaan dan penertiban parkir;
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
- 6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Bidang Lalu Lintas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:

- 1) Sub Koordinator Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- 2) Sub Koordinator Perlengkapan Jalan; dan
- 3) Sub Koordinator Perpakiran.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Lalu Lintas.

c. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu Daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan satu Daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu Daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah, pengelolaan terminal Tipe C, pengujian berkala kendaraan bermotor, sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pembinaan dan pengawasan

bengkel dan karoseri, pengawasan dan pengelolaan fasilitas penyeberangan. Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

- 1) perumusan program kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
- 2) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang angkutan dan pengujian kendaraan bermotor;
- 3) pengendalian operasional angkutan, terminal, dan fasilitas pendukung angkutan jalan;
- 4) penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 5) penetapan rencana umum jaringan trayek dalam satu Daerah;
- 6) penetapan wilayah operasi angkutan orang dan barang dalam Daerah;
- 7) penyelenggaraan angkutan orang dan barang dalam satu Daerah;
- 8) pembinaan pemilik kendaraan bermotor wajib uji, kendaraan tidak bermotor, bengkel dan karoseri;
- 9) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang lalu lintas; dan
- 10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator terdiri atas:

- 1) Sub Koordinator Angkutan;
- 2) Sub Koordinator Pengujian Kendaraan Bermotor; dan;
- 3) Sub Koordinator Perbengkelan.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor.

d. Bidang Operasi dan Pengendalian

Bidang Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengawasan dan penertiban lalu lintas, pembinaan dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan aturan yang berlaku, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan, penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah. Bidang Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- 1) perumusan program kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
- 2) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang operasi dan pengendalian;
- 3) pengoordinasian kegiatan pengawalan dan penertiban lalu lintas di bidang perhubungan;
- 4) penyelenggaraan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan;
- 5) pembinaan kepada pengguna jalan terkait pemahaman fungsi sarana dan prasarana jalan;
- 6) pengoordinasikan penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api yang melintas di Daerah;
- 7) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang operasi dan pengendalian; dan
- 8) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Operasi dan Pengendalian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi atas 3 (tiga) Sub Koordinator, terdiri atas:

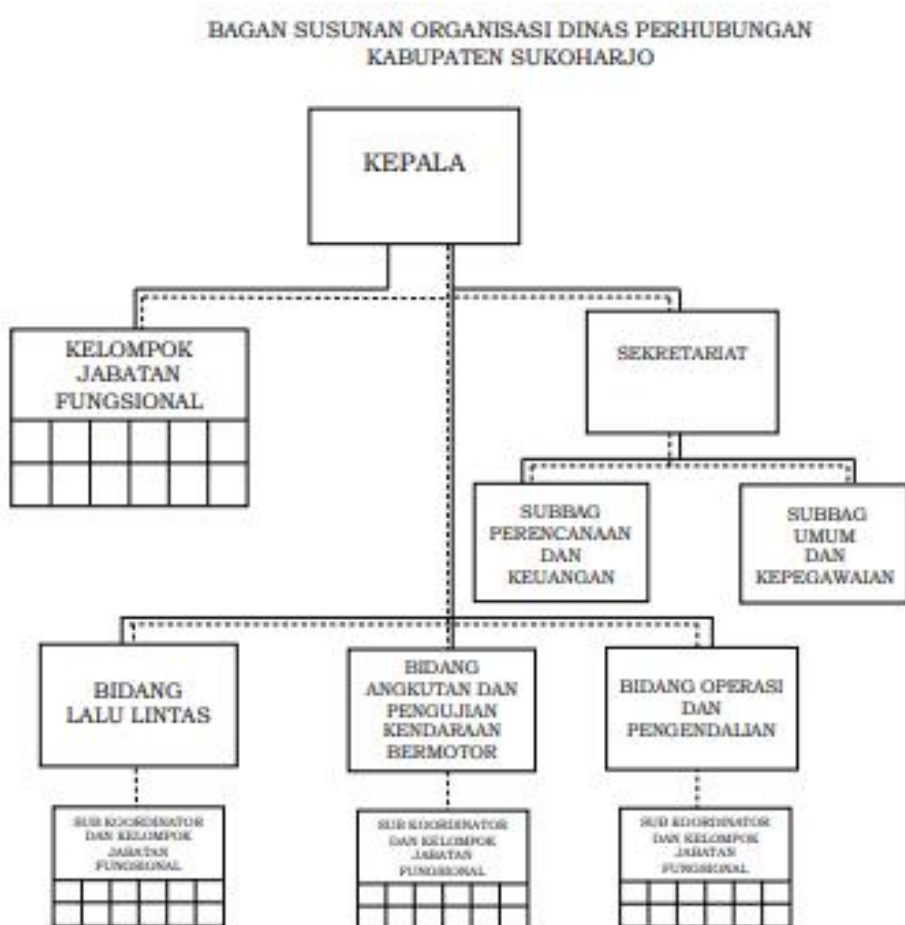
- 1) Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian

Lalu Lintas;

- 2) Sub Koordinator Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan; dan
- 3) Sub Koordinator Perkeretaapian.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian.

e. Kelompok Jabatan Fungsional



Keterangan:
—————: Garis Perintah
-----: Garis Koordinasi

2.3.3. Tantangan Dan Hambatan Dalam Peningkatan Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sukoharjo yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 dalam pelaksanaannya mendapati berbagai permasalahan dan keterbatasan. Permasalahan dan keterbatasan di bidang perhubungan pada Tahun 2025 antara lain :

1. Peningkatan mobilitas masyarakat yang massif;
2. Munculnya titik simpul kemacetan;
3. Meningkatnya area rawan kecelakaan (black spot);
4. Menurunnya jumlah trayek yang terlayani angkutan umum;
5. Kondisi kendaraan angkutan umum yang semakin tidak representatif;
6. Sistem pelayanan umum di sektor perhubungan yang belum terintegrasi secara maksimal;
7. Ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang belum maksimal sesuai kebutuhan;
8. Belum maksimalnya ketersediaan dan fungsi terminal;
9. Belum tersedianya ruang parkir dan bongkar muat bagi truk muatan besar yang terpusat dan terkendali;
10. Belum maksimalnya penerapan andalalin di daerah dengan adanya Sentral Bisnis terbangun yang belum menyusun analisa dampak lalu lintas;
11. Belum maksimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah;
12. Belum adanya kajian terkait ruas jalan yang ideal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Beberapa permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang dihadapi pada tahun 2025, antara lain :

1. Angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi;
2. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas;
3. Kondisi terminal type c yang kurang representatif untuk pelayanan kepada masyarakat;

4. Kondisi angkutan umum yang kurang representatif bagi pengguna angkutan umum baik dari segi sarana dan prasarannya sehingga kurang diminati oleh masyarakat;
5. Kurangnya study kajian kelalulintasan khusus guna inovasi pelaksanaan urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
6. Kondisi masyarakat pengguna jalan yang belum tertib berlalu lintas dan melaksanakan keselamatan berkendara;
7. Manajemen rekayasa lalu lintas yang perlu ditingkatkan;
8. Kondisi trayek angkutan yang masih tidak sesuai dengan jumlah pengguna angkutan;
9. Belum maksimalnya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di bidang perhubungan;
10. Belum maksimalnya layanan andalalin;
11. Belum mencukupinya personel operasional pemeliharaan untuk memonitoring dan menyelesaikan permasalahan rambu di wilayah secara tepat waktu
12. Belum tersedianya angkutan bersubsidi baik melalui mekanisme APBD ataupun CSR, dan baru 2 jalur yang terlayani oleh BST yang pendanaannya berasal dari Pusat
13. Keterbatasan anggaran untuk pengelolaan angkutan umum.
14. Penurunan jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi;
15. Masih terdapat Kesulitan dalam penyusunan dokumen keselamatan lalu lintas
16. Masih terdapat perlintasan sebidang yang belum memiliki sarana ataupun prasarana pengaman yang memadai

Sesuai dengan permasalahan di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria permasalahan yaitu kurang terpenuhinya prasarana infrastruktur perhubungan yang termodernisasikan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan, kurang maksimalnya layanan angkutan umum, dan belum maksimalnya fasilitasi di bidang perhubungan dalam rangka mendukung layanan pasca covid-19. Pemenuhan sarana prasarana infrastruktur dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan pengadaan rambu, traffic light, sarana keamanan lalu lintas, rehabilitasi dan perbaikan fasilitas umum perhubungan/ terminal dengan memperhatikan kelengkapan

fasilitas protokol kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum dapat ditindaklanjuti dengan mulai melaksanakan kajian analisis kebutuhan jaringan trayek sehingga dapat diketahui potensi jaringan trayek yang ada di wilayah serta melakukan sosialisasi pengusaha angkutan untuk dapat meningkatkan layanannya. Peningkatan layanan perhubungan dapat dilaksanakan dengan menyediakan prasarana Bus Trans Jateng dan berkoordinasi serta menerapkan kebijakan dari kabupaten, provinsi ataupun pusat dalam rangka mendukung layanan sektor perhubungan.

Kerangka pikir analisis permasalahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

<p>Permasalahan I : kurang terpenuhinya prasarana infrastruktur perhubungan yang termodernisasikan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan</p>			1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			2	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			4	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
<p>Permasalahan II: Kurang maksimalnya layanan</p>			5	Sub Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
			6	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
			7	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan
<p>Permasalahan II: Belum maksimalnya fasilitasi di bidang perhubungan dalam rangka mendukung layanan pasca covid-19</p>			8	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
			9	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

<p>Permasalahan I: kurang terpenuhinya prasarana infrastruktur perhubungan yang termodernisasikan dalam rangka menekan tingginya angka kecelakaan</p>		10 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
<p>Permasalahan II: Kurang maksimalnya layanan</p>		11 Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
<p>Permasalahan II: Belum maksimalnya fasilitasi di bidang perhubungan dalam rangka mendukung layanan pasca covid-19</p>		12 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		36. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		37. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		38. Sub Kegiatan Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
		39. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
		40. Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
		41. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
		42. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
		43. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
		44. Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		45. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		46. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		47. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
		48. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
		49. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
		50. Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
		51. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat

Usulan Masyarakat yang ditampung disampaikan berjenjang mulai dari musrenbangdes, musrenbangcam, hingga ke Forum Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2024.

No (1)	Kegiatan (2)	Lokasi (3)	Volume (4)
1	Pengadaan PJU	Dk. Godog sampai Dk. Tanjung Titik Koordinat 7°39'00.1"S 110°52'49.6"E	3000 meter
2	Pengadaan PJU	Sanggung	10 titik
3	Pengadaan PJU	Jalan Kapten Abdullatief Antara Jembatan Tanjung dan Jembatan Nongko koordinat awal : (-7.647091,110.865152)	15 unit
4	Pengadaan PJU	Jalan poros desa Ngowan - Bleki merupakan jalan akses Pariwisata ke Makam Kyai Balak. Koordinat : 7°40'30.3"S 110°52'57.9"E	2 unit
5	Pengadaan PJU	Jalan poros desa glondongan-tugu depan SDN 1 Polokarto Koordinat awal :(-7.6387170,110,9198969	2000 meter
6	Pengadaan PJU	Dk.Beton WetanRT 02 RW 03 Desa Ngombakan	30 titik
7	Pengadaan PJU	Dk Menggah RT 04/04 Desa Pranan. Koordinat : - 7.617897,110.834074	30 unit
		Jalan Karangwuni - Wirun Mojolaban Koordinate : - 7.617766,110.856267 // -7.617098,110.854053	
8	Pengadaan PJU	Gedongan	30 buah
	Usulan Sosialisasi Keselamatan	Dk Brajan Rt 01/02, Desa Bugel Kecamatan Polokarto. Koordinat (- 7.38'12", 110.51'8", 156,6m, 200.	45 orang
9	Pengadaan PJU	Jalan Dr. Moewardi (Pertigaan SMA Veteran - Pertigaan Pecel Mbotho)	

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan memanfaatkan penerimaan Hibah/CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari pihak swasta untuk mengurangi penggunaan APBD Kabupaten Sukoharjo dalam memperoleh sarana dan prasarana jalan. Usaha ini dilakukan terkait pengadaan tempat pemberhentian bus atau Halte untuk memenuhi kebutuhan pemberhentian bus atau halte terutama pada Jalur Trans Jateng ataupun BST yang melewati Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

2.7. Penghargaan

Di tahun 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo masih proses penialian penghargaan WTN. Dalam proses tersebut sementara ini menduduki peringkat 01 segi administrasi WTN. Penilaian final akan dilaksanakan di tahun 2024.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Transportasi Nasional

Sejalan dengan visi pembangunan “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”, maka pembangunan nasional 2020-2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek transportasi dalam upaya membangun infrastruktur ekonomi. Mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024 terdapat tiga isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi Pembangunan transportasi, yaitu:

Isu Strategis 1: Penguatan Konektivitas Nasional

Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi. Kebijakan strategis untuk mewujudkan konektivitas nasional adalah:

- a. Menyediakan layanan transportasi melalui skema perintis/PSO yang menghubungkan antara simpul dengan lokus KSN (KEK, KI, KSPN, DTPK) terdekat, Dimana Keterhubungan antara simpul transportasi dengan lokus KSN akan meningkatkan nilai konektivitas, aksesibilitas dan integrasi antar moda;
- b. Menyediakan layanan angkutan barang melalui skema perintis/PSO yang melayani terminal terminal barang yang ada di pusat pertumbuhan ekonomi;
- c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi;

- d. Mempercepat regulasi yang mendukung terwujudnya penguatan dan peningkatan aksesibilitas jaringan layanan multimoda terhadap simpul utama dan KSN.

Isu Strategis 2: Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi

Arah kebijakan dan strategi yang disusun dalam lima tahun kedepan untuk mewujudkan peningkatan layanan transportasi adalah:

- a. Menyiapkan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian system aplikasi, basis data, dan infrastruktur terkait dengan pengukuran kinerja OTP sektor perhubungan;
- b. Menyusun instrumen dan pelaksanannya untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi;
- c. Memfasilitasi tersedianya klinik SDM untuk berkontribusi pada pendampingan perbaikan sistem layanan sebagai umpan balik catatan keluhan pengguna layanan jasa transportasi;
- d. Melaksanakan analisis desain untuk sarana dan prasarana transportasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan;
- e. Melakukan evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan delay yang terjadi pada sistem layanan transportasi

Isu Strategis 3: Kebijakan Keselamatan Transportasi

Arah kebijakan dan strategi yang disusun dalam lima tahun kedepan untuk mewujudkan peningkatan layanan transportasi adalah:

- a. Peningkatan monitoring dan audit keselamatan secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi
- b. Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, serta travel data recording
- c. Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan dalam upaya peningkatan keselamatan transportasi

- d. Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum
- e. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam keselamatan bertransportasi melalui program pelatihan, pembentukan, penjenjangan, dan pelatihan teknis untuk regulator dan operator

3.1.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Perhubungan

Untuk mencapai prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
- b. Perkuatan Jalur Logistik Utama;
- c. Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
- d. Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Didasarkan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

- a. Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
- b. Merajut Konektivitas Antar Wilayah sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
- c. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan

- d. Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 – 2024 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional maupun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020 – 2024.

Arah Kebijakan dan Strategi memuat langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Program indikatif tersebut harus mendukung sasaran RPJMN 2020 – 2024 sesuai dengan bidang terkait. Sebagai bagian dari sektor transportasi, maka sesuai dengan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional sebagaimana disebut sebelumnya, maka Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2020 – 2024 sebagaimana tertuang pada Tabel 3.3. di bawah ini. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan diperoleh dengan mendasarkan pada potensi yang ada, yang diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sektor perhubungan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

3.2.1. Visi dan Misi

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka mendukung program-program Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo harus berpedoman pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah dirangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Periode 2021-2026 yaitu : **“TERWUJUDNYA SUKOHARJO YANG LEBIH MAKMUR”**.

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik social maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR : merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi

AMAN	: Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar
KONSTITUSIONAL	: Mengandung pengertian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.
MANTAP	: Mengandung pengertian bahwa warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.
UNGGUL	: Mengandung pengertian semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik.
RAPI	: Mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021-2026 tersebut dicapai melalui Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan percepatan reformasi birokrasi. Misi ini mempunyai Tujuan terwujudnya tata pemerintahan yang profesional, dengan indikator kinerja adalah Indeks Reformnasi Birokrasi (IRB) dan Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualkitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel.
2. Misi meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Misi ini mempunyai Tujuan membentuk sumber daya

manusia yang sehat, cerdas, inovatif dan berkarakter dengan indikator kinerja adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; 2) Meningkatnya kualitas pendidikan; 3) Meningkatnya pengendalian penduduk; 4) Meningkatnya akses dan kualitas hidup , perlindungan terhadap perempuan, anak , kesetaraan gender dan pemuda; 5) Meningkatnya kearifan dan budaya lokal; 6) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin.

3. Misi memperkuat perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi. Misi ini mempunyai Tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dengan indikator kinerja adalah Tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat angka kemiskinan, Tingkat pengangguran terbuka, dan Tingkat pendapatan perkapita. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya pertumbuhan produktivitas; 2) Meningkatnya kemandirian desa.
4. Misi memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan. Misi ini mempunyai Tujuan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan indikator kinerja adalah Indeks pembangunan infrastruktur (IPI), Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), dan Indeks resiko bencana. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas infrastruktur; 2) Meningkatnya kualitas lingkungan.

Misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan keagamaan. Misi ini mempunyai Tujuan mewujudkan masyarakat sukoharjo yang aman dan nyaman dengan indikator kinerja adalah Presentase penanganan gangguan keamanan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Sasaran yang ingin dicapai adalah 1) Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertibn masyarakat; 2) Meningkatnya kesatuan bangsa dan bernegara.

3.2.2. Tujuan Perangkat Daerah

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 serta tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026. Dalam rangka mendukung ketercapaian kinerja khususnya dalam Misi ke 4 (empat) yaitu Memperkuat pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan, Tujuan ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan infrastruktur (IPI) serta Sasaran ke 1 (satu) dari Tujuan ke 1 (satu) Misi ke 4 (empat) yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur dengan indikator kinerja Indeks Fatalitas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo telah menentukan Tujuan Perangkat Daerah yang ingin dicapai yaitu Terwujudnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Baik dengan indikator kinerja Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan yang mana diharapkan target kinerja yang dapat tercapai untuk tahun 2025 adalah 0,185.

Upaya untuk menurunkan Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan adalah melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produktifitas pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Penguatan berarti Dinas Perhubungan berusaha meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung tercapainya infrastruktur yang baik sebagaimana misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026. Untuk mencapai indikator kinerja sebagaimana tersebut di atas dilaksanakanlah program dan kegiatan tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten

Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran Rencana Kerja Tahunan.

3.2.3. Sasaran Perangkat Daerah

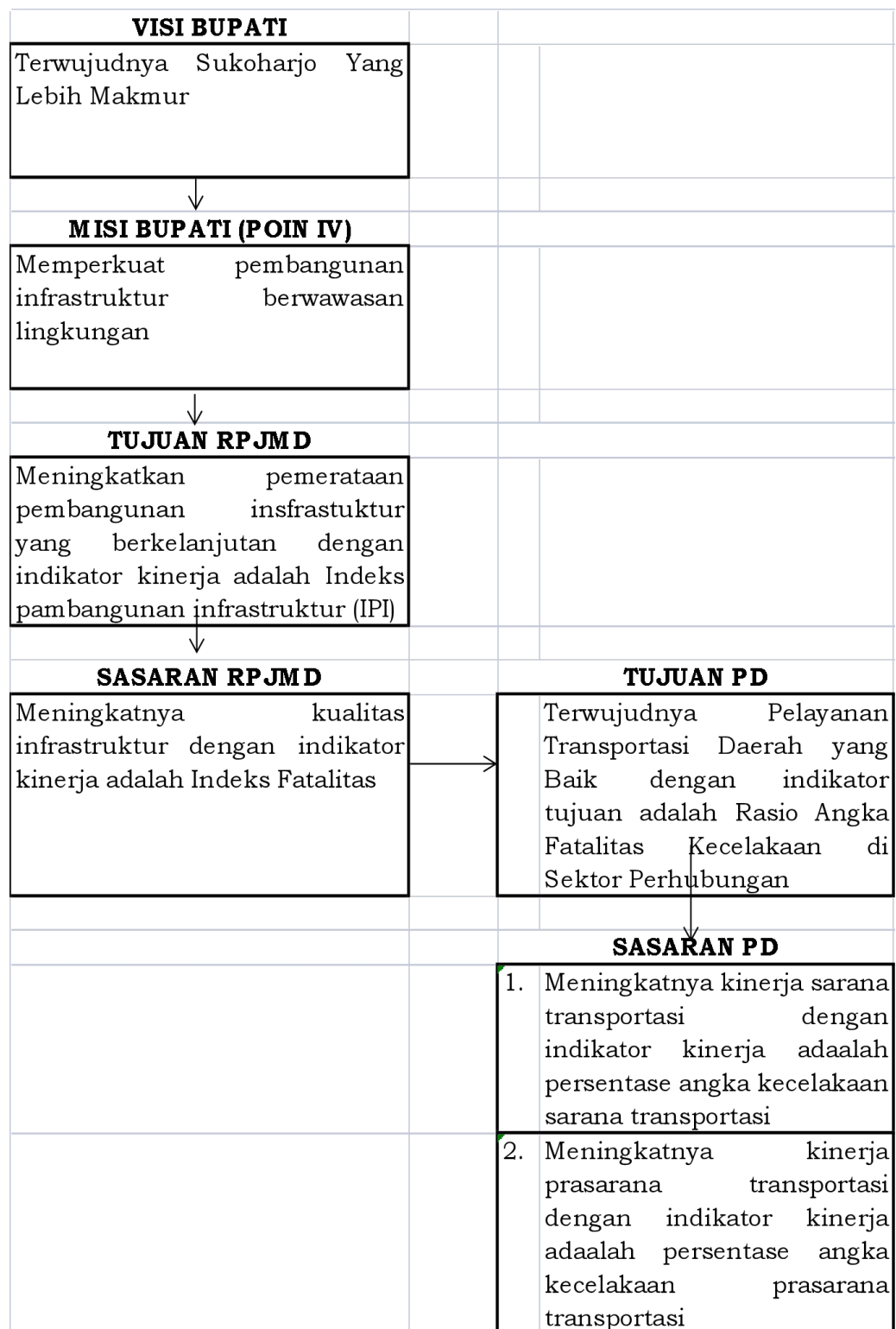
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang mana dalam kaitan urusan perhubungan, sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai sebagai tolok ukur berhasil atau tidaknya pencapaian dari suatu tujuan. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo adalah 1) meningkatnya kinerja sarana transportasi dengan indikator kinerja persentase angka kecelakaan sarana transportasi dan; 2) meningkatnya kinerja prasarana transportasi dengan indikator kinerja persentase angka kecelakaan prasarana transportasi. Adapun target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja sarana transportasi, dengan target kinerja 0.75%;
2. Meningkatnya kinerja prasarana transportasi, dengan target kinerja 18%.

Sementara itu, untuk indikator tujuan dan sasaran jangka menengah berkaitan dengan kesekretariatan :

1. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik, dengan target kinerja nilai SAKIP 77.

Sasaran tersebut diatas ditargetkan akan menurun setiap tahunnya sehingga angka kecelakaan juga semakin menurun. Sasaran di atas merupakan indikator/ tolok ukur dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo dalam satu tahun anggaran dengan harapan dapat mencapai target indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo periode 2021-2026 pada urusan perhubungan. Hubungan keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:



3.2.4. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah / tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo selaku Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang bertanggung jawab kepada Bupati atas Urusan di Bidang Perhubungan merumuskan beberapa kebijakan yang dijadikan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan fasilitas perhubungan berupa sarana mobilitas pemeliharaan perlengkapan jalan (marka, rambu, traffic light, cctv, pagar pengaman jalan, dan lain-lain);
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas perlengkapan jalan;
3. Peningkatan pemahaman keselamatan lalu lintas kepada masyarakat;
4. Peningkatan sarana edukasi kelalulintasan kepada masyarakat;
5. Pengaturan, pengamanan, dan pengawasan lalu lintas;
6. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan standar laik jalan yang telah diatur dalam perundang-undangan;
7. Penataan trayek angkutan umum sesuai dengan potensi penumpang angkutan umum melalui kajian study angkutan;
8. Mewujudkan kajian study kelalulintasan guna inovasi pelaksanaan urusan perhubungan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo;
9. Peningkatan jumlah terminal/halte;
10. Peningkatan layanan andalalin;

Kebijakan tersebut dijabarkan dalam 3 program, 21 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada anggaran tahun 2025 guna mewujudkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun tersebut sesuai target Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026.

3.2.5. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan oleh perangkat daerah yang bersangkutan. Berdasarkan strategi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten

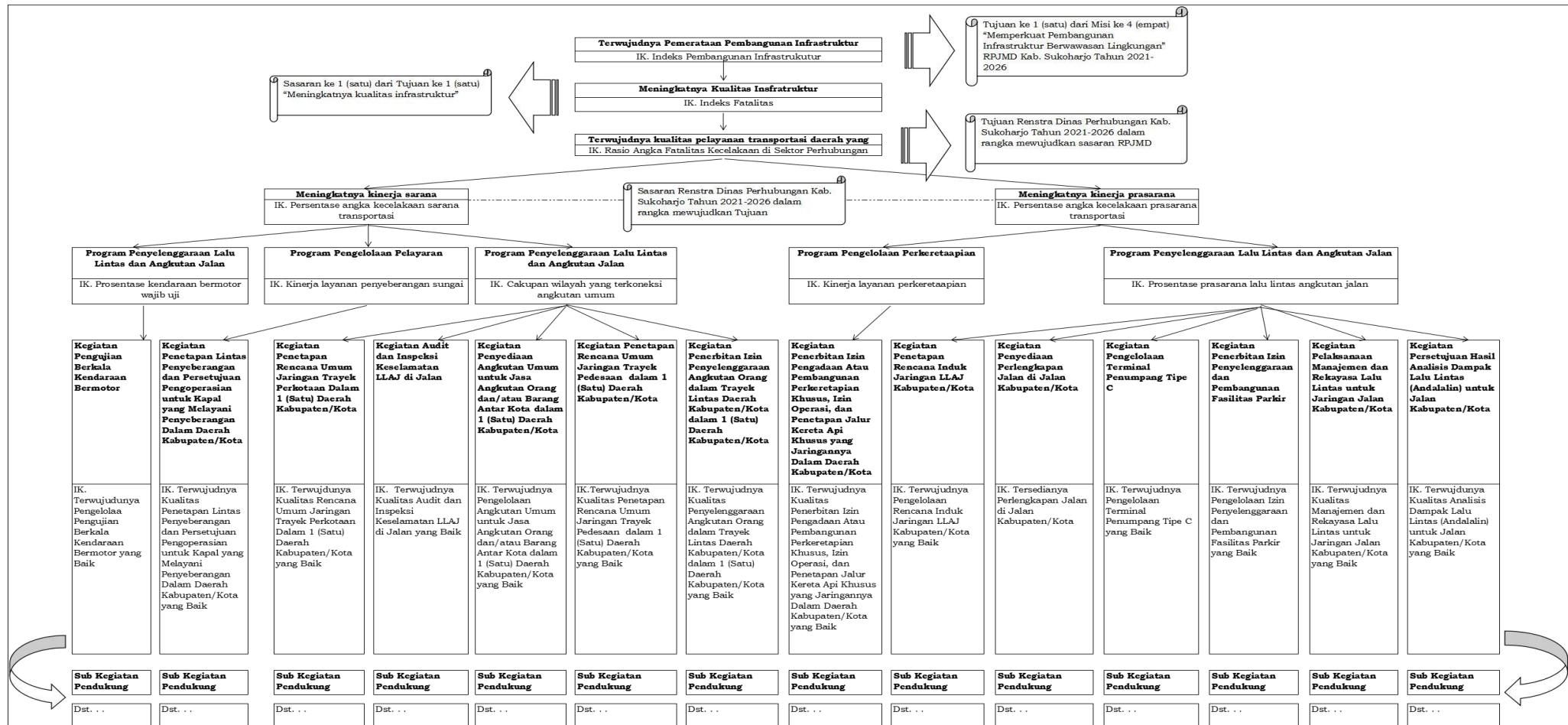
Sukoharjo, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan beberapa strategi guna menghadapi isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi dalam kaitannya dengan urusan perhubungan. Strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Meningkatkan kuantitas aparat Dinas Perhubungan dengan basic pengetahuan bidang transportasi sehingga perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan inovatif untuk peningkatan kualitas transportasi;
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/ administrasi/ manajemen pemerintahan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui media teknologi informasi menuju e-government;
4. Peningkatan kelancaran pelayanan lalu lintas angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan fasilitas dan rambu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan, penegakan andalalin, penataan ijin trayek dan kerja sama antar lembaga pemerintah;
5. Pengintegrasian sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem prasarana lainnya;

Mengimplementasikan kebijakan dan kegiatan di bidang perhubungan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

3.3. Cascading Perencanaan Perangkat Daerah

Keterkaitan Kinerja Renstra Dinas Perhubungan Terhadap RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 2026



Keterkaitan pola kinerja Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2025 terhadap target kinerja RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat sebagai berikut:

3.4. Formulasi (metadata) Indikator Kinerja yang ada (Indikator Tujuan/Sasaran/Program)

Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 menggunakan formulasi seperti pada table sebagai berikut:

FORM METADATA INDIKATOR
PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021-2026

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif /Kualitatif /Persentase/Rasio /Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental /Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD /SPM/SDGs/ RPJMN/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Jumlah Korban Kecelakaan Meninggal Dunia di karenakan Faktor Perhubungan dalam 1 tahun dibagi Jumlah Kecelakaan dalam 1 tahun	Rasio/ Nilai	0,270	0,310	0,305	Rasio Angka Fatalitas Kecelakaan di Sektor Perhubungan	Jumlah Korban Kecelakaan Meninggal Dunia di karenakan Faktor Perhubungan dalam 1 tahun dibagi Jumlah Kecelakaan dalam 1 tahun	Rasio/ Nilai	0,195	0,190	0,185	0,180	0,180	Indikator Tujuan	Rasio	Negatif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
2	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Sarana Transportasi (Kendaraan nya) dibagi Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun dikali 100%	Persentase	0,50	2	1,50	Persentase angka kecelakaan sarana transportasi	Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Sarana Transportasi (Kendaraan nya) dibagi Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun dikali 100%	Persentase	0,90	0,85	0,75	0,50	0,50	Indikator Sasaran	Persentase	Negatif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
3	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Prasarana Transportasi (Fasilitas Jalan) dibagi Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun dikali 100%	Persentase	23,50	26,50	26	Persentase angka kecelakaan prasarana transportasi	Jumlah Kecelakaan Akibat Faktor Prasarana Transportasi (Fasilitas Jalan) dibagi Jumlah Kecelakaan dalam 1 (satu) tahun dikali 100%	Persentase	19	18,5	18	17,5	17,5	Indikator Sasaran	Persentase	Negatif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
4	Nilai SAKIP	Jumlah Nilai Sakip	Nilai	61	63	66	Nilai SAKIP	Jumlah Nilai Sakip	Nilai	70	75	77	79	79	Indikator Tujuan dan Sasaran	Nilai	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
5	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah kendaraan lulus uji dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dikali 100%	Persentase	77%	70,30	70,60	Prosentase kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah kendaraan lulus uji *0,5 dibagi jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) dikali 100%	Persentase	70,90	71,20	71,50	71,80	71,80	Indikator Program	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
6	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	Ruas jalan yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah ruas jalan dikali 100%	Persentase	10,27	10,27	10,27	Cakupan wilayah yang terkoneksi angkutan umum	Ruas jalan yang terlayani angkutan umum dibagi jumlah ruas jalan kabupaten dikali 100%	Persentase	10,27	11	11,49	11,98	11,98	Indikator Program	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif /Kualitatif /Persentase/Rasio /Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental /Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD /SPM/SDGs/ RPJMN/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	Jumlah sarpras (terminal, halte, shelter, rambu, APILL, warning light, guardrill, marka, cermin tikung, LPJU) kondisi baik dibagi Jumlah total sarpras dikali 100%	Persentase	80	81	82	Prosentase sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan	Jumlah sarpras (terminal, halte, shelter, rambu, APILL, warning light, guardrill, marka, cermin tikung, LPJU) kondisi baik dibagi Jumlah total sarpras dikali 100%	Persentase	83	84	85	86	86	Indikator Program	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
8	Kinerja layanan penyeberangan sungai	Jumlah penyeberangan sungai yang terlayani dibagi jumlah layanan yang ada dikali 100%	Persentase	100	100	100	Kinerja layanan penyeberangan sungai	Jumlah penyeberangan sungai yang terlayani dibagi jumlah layanan yang ada dikali 100%	Persentase	0	0	0	0	100	Indikator Program	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
9	Kinerja layanan perkeretaapian	Jumlah penyeberangan kereta api yang terlayani dibagi jumlah penyeberangan kereta yang terdaftar/ resmi dikali 100%	Persentase	100	100	100	Kinerja layanan perkeretaapian	Jumlah penyeberangan kereta api yang terlayani dibagi jumlah penyeberangan kereta yang terdaftar/ resmi dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Program	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
10	Terwujudnya Layanan Administrasi Perkantoran yang Baik	Jumlah Unit Layanan Kantor yang Terlayani	Unit	4	4	4	Terwujudnya Layanan Administrasi Perkantoran yang Baik	Jumlah Unit Layanan Kantor yang Terlayani	Unit	4	4	4	4	4	Indikator Program	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
11	Terwujudnya Pengelola Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Pengelolaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
12	Pembinaan pemilik bengkel umum dan karoseri serta para pemilik kendaraan tidak bermotor yang mengikuti sosialisasi	Jumlah orang yang tersosialisasikan	Orang	45	45	50	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian	Jumlah Laporan yang terselesaikan	Laporan	1	1	2	2	6	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
13	Alat uji yang lulus uji kalibrasi	Jumlah alat uji terkalibrasi	Unit	9	9	9	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	9	9	9	9	9	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif/Kualitatif/Persentase/Rasio/Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/Incremental/Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD/SPM/SDGs/RPJM/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	Sosialisasi kepada masyarakat pemilik kendaraan wajib uji	Jumlah orang yang tersosialisasikan	Orang	45	45	50	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan yang terselesaikan	Laporan	1	1	2	2	6	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
15	Pelaksanaan uji petik kelaikan kendaraan angkutan di terminal-terminal dan garasi PO Bus	Jumlah bus yang lulus uji	Unit	95	95	100	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan yang terselesaikan	Laporan	1	1	2	2	6	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
16	Terwujudnya Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
17	Operasi pelaksanaan penertiban angkutan umum yang dilaksanakan	Jumlah operasi yang dilaksanakan	Kali	115	115	120	Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan	Jumlah Laporan yang terselesaikan	Laporan	12	12	12	12	48	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
18	Pelaksanaan sosialisasi bagi para sopir/jurumudi sehingga memahami aturan keselamatan penumpang	Jumlah orang yang tersosialisasikan	Orang	25	25	30	Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan yang terselesaikan	Laporan	12	12	12	12	48	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
19	Pelaksanaan sosialisasi Pengelola Angkutan Umum sehingga memahami aturan keselamatan penumpang	Jumlah orang yang tersosialisasikan	Orang	25	25	30	Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	Jumlah Laporan yang terselesaikan	Laporan	1	0	0	0	1	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
20	Terwujudnya Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif /Kualitatif /Persentase/Rasio /Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental /Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD /SPM/SDGs/ RPJMN/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
21	Pengamanan harian dan insidentil yang diselenggarakan	Jumlah pengamanan yang dilaksanakan	Kali	185	185	187	Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang terselesaikan	Dokumen	0	0	0	0	2	Indikator Sub Kegiatan	Dokumen	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
22	Terwujudnya Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Pengelolaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
23	Terlaksananya kajian manajemen pengelolaan angkutan yang baik	Jumlah kajian yang diadakan	Dokumen	1	1	1	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	33	33	33	33	33	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
24	Terupdatenya data pokok pelayanan angkutan	Jumlah database yang terupdate	Database	1	1	1	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang terselesaikan	Laporan	4	5	5	5	19	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
25	Terwujudnya Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
26	Terwujudnya Dokumen RUJT dan SK Bupati tentang RUJT	Jumlah dokumen yang diadakan	Dokumen	1	0	1	Terlaksananya Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang diselesaikan	Dokumen	0	0	0	0	1	Indikator Sub Kegiatan	Dokumen	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif/Kualitatif/Persentase/Rasio/Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/Incremental/Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD/SPM/SDGs/RJMN/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji coba implementasi RUJT	Jumlah orang yang tersosialisasi	Orang	55	55	60	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang terselesaikan	Dokumen	4	5	6	7	22	Indikator Sub Kegiatan	Dokumen	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
28	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Penyerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
29	Perizinan yang terfasilitasi	Jumlah izin angkutan yang terfasilitasi	Izin	25	25	25	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah laporan yang diselesaikan	Laporan	4	5	5	5	19	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
30	Koordinasi peningkatan perencanaan pengelolaan angkutan yang dilaksanakan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	6	6	7	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi yang diselesaikan	Laporan	12	12	12	12	48	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
31	Terwujudnya Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif /Kualitatif /Persentase/Rasio /Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental /Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD /SPM/SDGs/ RPJMN/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
					6	7				8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
32	Terlaksananya pemeliharaan perahu penyeberangan sehingga dapat berfungsi baik	Jumlah perahu yang berfungsi baik	Unit	1	1	1	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang diselesaikan	Laporan	0	0	0	0	2	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
33	Terwujudnya Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Pengelolaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
34	Terlaksananya kajian manajemen lalu lintas	Jumlah kajian yang diadakan	Kajian	3	3	4	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang diselesaikan	Dokumen	4	4	4	4	16	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
35	Terselenggaranya sosialisasi keselamatan lalu lintas	Jumlah orang yang tersosialisasikan	Orang	4000	4000	4250	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah dokumen yang diselesaikan	Dokumen	1	0	0	0	1	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
36	Terlaksananya koordinasi wahana tata nagraha	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Kali	6	6	7	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang diselesaikan	Laporan	1	0	0	0	1	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
37	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif /Kualitatif /Persentase/Rasio /Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental /Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD /SPM/SDGs/ RPJMN/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38	Terwujudnya pemasangan pagar pengaman jalan	Jumlah pagar pengaman jalan yang diadakan	Meter	70	70	72	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	25	50	60	65	200	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
39	Penerangan jalan umum dalam kondisi baik	Jumlah titik PJU yang dilakukan pemeliharaan	Titik	3000	3000	3200	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	3300	3412	3489	3576	3576	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
40	Terlaksananya pemeliharaan rambu keselamatan jalan	Jumlah rambu dilakukan pemeliharaan	Unit	1250	1250	1275	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1285	1411	1537	1660	1660	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
41	Terwujudnya pengadaan marka jalan dan zona aman selamat sekolah	Jumlah marka yang diadakan	M2	5240	5240	5320	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	7000	7829	8650	9220	9220	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
42	Terwujudnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dibagi jumlah target	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dibagi jumlah target	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
43	Terwujudnya pembangunan terminal/ shelter/ halte	Jumlah terminal/ shelter/ halte yang diadakan	Unit	2	2	2	Terbangunnya Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	0	6	6	6	18	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
44	Terminal tipe c dan shelter sesuai standar pelayanan minimal	Jumlah terminal yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	4	4	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4	4	4	4	4	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
45	Terwujudnya Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Pengelolaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
46	Meningkatnya jumlah petugas parkir yang paham dan mengimplementasikan tata cara perparkiran yang baik	Jumlah orang yang tersosialisasikan	Orang	850	850	875	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan	Jumlah laporan koordinasi yang diselesaikan	Laporan	2	2	2	2	8	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif /Kualitatif /Persentase/Rasio /Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental /Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD /SPM/SDGs/ RPJMN/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
47	Terwujudnya Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
48	Terwujudnya pengadaan Rambu Keselamatan Jalan dan ATCS yang terpasang	Jumlah rambu yang diadakan	Unit	118	118	121	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	Dokumen	2	2	2	2	8	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
49	Permasalahan lalu lintas yang diselesaikan dalam koordinasi lalu lintas antar stakeholder bidang perhubungan	Jumlah permasalahan yang diselesaikan	Kasus	6	6	6	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	Jumlah laporan Forum lalu lintas yang terselesaikan	Laporan	6	6	6	6	24	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
50	Terwujudnya Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
51	Pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan kajian analisis dampak lalu lintas	Jumlah bangunan yang dilakukan kajian analisis dampak lalu lintas	Bangunan	12	12	13	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	10	11	12	13	46	Indikator Sub Kegiatan	Bangunan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
52	Terwujudnya Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif /Kualitatif /Persentase/Rasio /Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental /Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD /SPM/SDGs/ RPJMN/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
53	Terwujudnya Fasilitas Penyeberangan Kereta yang baik	Jumlah fasilitas penyeberangan kereta yang dilakukan pemeliharaan	Titik	7	7	7	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi yang terselesaikan	Laporan	0	0	0	0	0	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
54	Terwujudnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
55	Terpenuhiya dokumen kelengkapan perencanaan skpd	Jumlah dokumen yang diadakan	Dokumen	6	6	6	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen yang diadakan	Dokumen	6	6	6	6	36	Indikator Sub Kegiatan	Dokumen	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
56	Terpenuhiya laporan keuangan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu	Jumlah dokumen yang diadakan	Dokumen	5	5	5	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah dokumen yang diadakan	Dokumen	5	5	5	5	30	Indikator Sub Kegiatan	Dokumen	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
57	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
58	Terpenuhiya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah orang yang terealisasi penggajiannya	Orang	40	45	50	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	51	56	57	58	58	Indikator Sub Kegiatan	Orang	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
59	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan	Dokumen	14	14	14	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen yang diadakan	Orang	14	14	14	14	84	Indikator Sub Kegiatan	Orang	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif /Kualitatif /Persentase/Rasio /Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental /Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD /SPM/SDGs/ RPJMN/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	Tersedianya laporan akhir tahun tepat waktu	Jumlah dokumen yang diadakan	Dokumen	1	1	1	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang diadakan	Dokumen	1	1	1	1	6	Indikator Sub Kegiatan	Dokumen	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
61	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Incremental	Lainnya	Perhubungan
62	Terwujudnya paksaan dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paksaan dinas yang diadakan	Stel	168	173	177	Jumlah Paket Paksaan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Paksaan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	156	159	163	164	992	Indikator Sub Kegiatan	Stel	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
63	Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	Orang	145	0	0	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	Orang	104	125	129	130	488	Indikator Sub Kegiatan	Orang	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
64	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
65	Terwujudnya Penyediaan Barang Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah barang instalasi listrik yang diadakan	Buah	20	20	20	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	paket	20	20	20	20	120	Indikator Sub Kegiatan	Jenis	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
66	Tersedianya peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Unit	3	4	5	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	12	12	12	53	Indikator Sub Kegiatan	paket	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
67	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Buah	20	20	20	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20	30	30	30	150	Indikator Sub Kegiatan	paket	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
68	Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah peralatan ATK yang diadakan	Jenis	76	76	76	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	76	76	76	76	76	Indikator Sub Kegiatan	paket	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif /Kualitatif /Persentase/Rasio /Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental /Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD /SPM/SDGs/ RPJMN/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
69	Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak Kantor	Jumlah barang cetakan yang diadakan	Jenis	25	25	25	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	paket	2	2	2	2	8	Indikator Sub Kegiatan	paket	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
70	Tersedianya jumlah bahan bacaan setiap bulan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan	Exemplar	90	90	90	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2	2	2	8	Indikator Sub Kegiatan	Dokumen	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
71	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	Kali	25	27	30	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	32	32	32	32	128	Indikator Sub Kegiatan	Kali	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
72	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
73	Terwujudnya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Unit	3	0	0	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	6	6	12	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
74	Terwujudnya Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Buah	10	10	13	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	16	30	30	30	129	Indikator Sub Kegiatan	paket	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
75	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
76	Jumlah surat keluar dan masuk yang dikelola	Jumlah surat keluar dan masuk yang dikelola	Surat	3000	3000	3010	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	12	48	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
77	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	rekening	3	3	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	48	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

No	Uraian Indikator Lama	Cara Perhitungan	Satuan	Data Awal	Target		Uraian Indikator Baru	Cara Perhitungan	Satuan	Target				Kondisi Akhir	Kelompok Indikator (Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Kualitas Indikator (Kuantitatif /Kualitatif /Persentase/Rasio /Rata-rata/Indeks)	Sifat Indikator (Positif/Negatif)	Teknik Pengukuran (Absolut/ Incremental /Kumulatif)	Cakupan Indikator (Makro/LPPD /SPM/SDGs/ RPJMN/Lainnya)	Bidang Urusan
					2021	2022				2023	2024	2025	2026							
1	2	3	4	5	6	7	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
78	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit	4	4	5	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	6	6	6	24	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
79	Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga non pns di lingkungan kantor	Jumlah pegawai non pns yang menerima honorarium	Orang	12	12	12	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	48	Indikator Sub Kegiatan	Laporan	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
80	Tervujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah realisasi kinerja pendukung peningkatan kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Persentase	100	100	100	100	100	Indikator Kegiatan	Persentase	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
81	Terselenggaranya Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor	Jumlah kendaraan yang dilakukan pemeliharaan	Unit	31	31	33	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	33	33	38	38	38	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
82	Terselenggaranya Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah unit bangunan gedung yang dilakukan pemeliharaan	Unit	4	4	4	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	4	4	4	4	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan
83	Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung yang dilakukan pemeliharaan	Unit	15	15	16	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	17	20	20	20	20	Indikator Sub Kegiatan	Unit	Positif	Absolut	Lainnya	Perhubungan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan program yang telah ditentukan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sebagai berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2
2.15.01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.15.01.2.01.0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.15.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
2.15.01.2.02.0005	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.15.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.15.01.2.05.0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

	Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.15.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.15.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.15.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.15.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.15.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.15.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.15.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.08.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.15.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.15.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.15.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.15.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.15.01.2.09.0011	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2.15.02.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.01.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0001	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.02.0003	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
2.15.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
2.15.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)

2.15.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.04.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.05	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0005	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0007	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0008	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.05.0010	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0015	Sub Kegiatan Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.06.0016	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
2.15.02.2.07	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
2.15.02.2.08	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
2.15.02.2.08.0004	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi

	Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
2.15.02.2.08.0007	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
2.15.02.2.08.0009	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.11.0003	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.0002	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.12	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.02.2.12.0001	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/kota
2.15.02.2.12.0002	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah

	Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.14.0003	Sub Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2.15.05	Program Pengelolaan Perkeretaapian
2.15.05.2.07	Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan Atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.15.05.2.07.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15.05.2.07.0002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Secara lengkap target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam lampiran Renja ini.

4.2. Kajian Terhadap Pagu/ Plafon Identifikasi Tahun Rencana

Sebagaimana uraian di atas bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo pada Tahun Anggaran 2025, jumlah program yang diusulkan sebanyak 3 program, 21 kegiatan dan 52 sub kegiatan. Adapun kajian terhadap kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada masing-masing program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Terdiri dari 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin kesekretariatan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp 10.016.708.924.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Terdiri dari 11 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur perhubungan serta peningkatan pengelolaan dan keselamatan angkutan jalan. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar Rp. 29.353.419.651.

3. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan. Berkaitan dengan pengelolaan keselamatan di perlintasan sebidang. Dana pagu indikatif yang diperlukan pada Program Pengelolaan Perkeretaapian sebesar Rp. 672.992.000.

4.3. Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja, Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Sesuai dengan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo mempunyai target kinerja sebanyak 3 program, 21 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan kebutuhan pagu anggaran sebesar Rp. 40.043.120.575 (Empat Puluh Milyar empat puluh tiga juta

seratus dua puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 sebagaimana tabel pada lampiran Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini sebagai pedoman pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026 guna mewujudkan visi misi Bupati terpilih serta acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.

Oleh sebab itu, dengan kesederhanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 ini, diharapkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik sesuai isi dan tujuan Rencana Kerja dimaksud.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi disertai dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kebersamaan dan pendayagunaan peran aktif masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menciptakan suatu kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan lancar.

LAMPIRAN